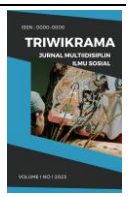
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



REPRESENTASI DIGITAL LEGISLATOR DI KOTA JAMBI : PELUANG TANTANGNAN DALAM KOMUNIKASI POLITIK MODERN

Imanuddin[1], Shodiq Nurya Habibie[2], Azura Hesra[3], Geraldin Nicholas Barus[4], M.Firzi Abijaya[5], Sutri Destemi Elsi[6]
Universitas Jambi

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember 2025
Revised Desember 2025
Accepted Desember 2025
Available online Desember 2025

Email:
imnddnn069@gmail.com ,
elsi@unja.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

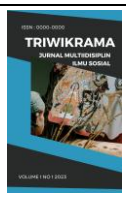
Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan perubahan signifikan dalam pola komunikasi politik di tingkat lokal, termasuk dalam praktik representasi politik oleh anggota legislatif daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana anggota DPRD Kota Jambi memanfaatkan platform digital terutama media sosial sebagai instrumen representasi politik dalam konteks komunikasi politik modern. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini memadukan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi aktivitas digital legislator, serta analisis konten atas pesan politik yang disampaikan melalui akun media sosial resmi maupun pribadi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa representasi digital memberikan peluang strategis bagi legislator untuk meningkatkan transparansi, memperluas jangkauan komunikasi, memperkuat responsivitas terhadap aspirasi publik, dan membangun citra politik yang lebih dekat dengan konstituen. Media digital juga memungkinkan proses komunikasi yang lebih cepat, interaktif, dan berbiaya rendah, sehingga membuka ruang bagi pembentukan hubungan representatif yang lebih inklusif. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi representasi digital di Kota Jambi. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas literasi digital sebagian legislator, kecenderungan penggunaan media sosial untuk konten seremonial dan personal yang tidak mencerminkan representasi substantif, rendahnya konsistensi penyampaian informasi publik, hingga potensi penyebaran disinformasi. Selain itu, minimnya dukungan kelembagaan dan ketiadaan standar operasional dalam pengelolaan komunikasi digital turut memperlemah efektivitas representasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun representasi digital di DPRD Kota Jambi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas komunikasi politik dalam era modern, pemanfaatannya masih berada pada tahap awal dan memerlukan penguatan kapasitas, regulasi internal, dan integrasi teknologi yang lebih terstruktur agar mampu berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas demokrasi lokal.

Kata kunci : Representasi digital, komunikasi politik, legislator, media sosial, DPRD Kota Jambi, representasi substantif, demokrasi lokal

Abstract

The development of digital technology has brought about significant changes in political communication patterns at the local level, including in the practice of political representation by regional legislators. This study aims to examine in depth how members of the Jambi City Regional People's Representative Council (DPRD) utilize digital platforms particularly social media as instruments of political representation in the context of modern political communication. Using a descriptive qualitative approach, this study combines data collection techniques such as in-depth interviews, observations of legislators' digital activities, and content analysis of political messages conveyed through official and personal social media accounts. The research findings indicate that digital representation provides a strategic opportunity for legislators to increase transparency, expand communication reach, strengthen responsiveness to public aspirations, and build a political image that is closer to constituents. Digital media also enables faster, more interactive, and lower-cost communication processes, thus opening up space for the formation of more inclusive representative relationships. However, this study also identifies several challenges that hinder the optimization of digital representation in Jambi City. These challenges include limited digital literacy capacity among some legislators, the tendency to use social media for ceremonial and personal content that does not reflect substantive representation, low consistency in the delivery of public information, and the potential for the spread of disinformation. Furthermore, the lack of institutional support and the absence

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



of operational standards in managing digital communications also weaken the effectiveness of representation. This study concludes that although digital representation in the Jambi City DPRD has great potential to improve the quality of political communication in the modern era, its utilization is still in its infancy and requires capacity building, internal regulations, and more structured technology integration to significantly contribute to the quality of local democracy.

Keywords *: Digital representation, political communication, legislators, social media, Jambi City DPRD, substantive representation, local democracy*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental lanskap politik di berbagai negara demokrasi. Digitalisasi komunikasi politik tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi secara cepat dan luas, tetapi juga membentuk kembali pola interaksi antara aktor politik dan masyarakat. Fenomena ini turut memengaruhi praktik representasi politik, terutama bagaimana legislator mengartikulasikan kepentingan konstituen dan menjalankan fungsi pengawasan serta legislasi. Dalam konteks demokrasi modern, representasi tidak lagi terbatas pada ruang-ruang formal seperti parlemen, rapat komisi, atau pertemuan tatap muka. Media digital termasuk media sosial telah berkembang menjadi arena baru bagi legislator untuk melakukan praktik representasi yang bersifat komunikatif, responsif, dan terbuka.(Almadhea et al., 2024)

Pada level lokal, khususnya di Kota Jambi, transformasi digital memberikan peluang strategis bagi anggota DPRD untuk memperluas akses komunikasi dengan masyarakat. Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi mengalami pertumbuhan signifikan dalam penggunaan internet dan penetrasi media sosial dalam kehidupan sehari-hari warganya. Hal ini menjadikan media digital sebagai medium potensial bagi legislator untuk meningkatkan transparansi, menyampaikan informasi kebijakan, menyerap aspirasi, serta memelihara hubungan representatif dengan konstituen. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok menjadi ruang publik baru (new public sphere) yang memungkinkan legislator membangun kedekatan simbolik dan memproyeksikan citra politik yang lebih mudah dijangkau oleh publik.(Alfan Jamil et al., 2025)

Meskipun demikian, representasi digital tidak selalu berjalan efektif. Berbagai penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi media digital dan praktik aktual pemanfaatannya oleh legislator. Banyak aktor politik memanfaatkan media sosial lebih sebagai alat pencitraan ketimbang mekanisme dialogis yang mendorong representasi substantif. Fenomena serupa juga tampak pada praktik komunikasi digital legislator di Kota Jambi, di mana konten bernuansa personal, seremonial, dan kegiatan rutin lebih dominan dibandingkan penyampaian informasi publik yang berkaitan dengan fungsi legislasi atau pengawasan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana media digital benar-benar meningkatkan kualitas representasi politik di tingkat lokal.

Selain itu, tantangan struktural dan kultural turut mempengaruhi efektivitas representasi digital. Keterbatasan literasi digital sebagian anggota DPRD, minimnya kapasitas tim pengelola media, serta ketiadaan panduan institusional terkait komunikasi publik digital menyebabkan praktik komunikasi politik legislator tidak berkembang secara optimal. Tantangan lain mencakup potensi disinformasi, rendahnya interaktivitas dua arah, serta preferensi publik yang cenderung berfokus pada konten hiburan daripada isu kebijakan. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak secara otomatis meningkatkan kualitas representasi politik; melainkan memerlukan kapasitas kelembagaan, kesadaran politik, dan kemampuan adaptasi teknologi yang memadai.(Nidya Agustin Beni Prasetyo, 2022)

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

penelitian ini penting dilakukan untuk memahami dinamika representasi digital legislator di Kota Jambi secara komprehensif. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana legislator memanfaatkan media digital untuk menjalankan fungsi representasi, peluang apa saja yang muncul dari praktik tersebut, serta tantangan apa yang menghambat efektivitasnya dalam konteks komunikasi politik modern. Analisis yang komprehensif tidak hanya memberikan kontribusi akademik terhadap kajian representasi politik di era digital, tetapi juga menawarkan implikasi praktis bagi penguatan demokrasi lokal melalui peningkatan kualitas komunikasi publik dan representasi substantif oleh anggota legislatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mendalami praktik representasi digital legislator di DPRD Kota Jambi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami fenomena sosial-politik secara mendalam dan kontekstual, terutama terkait pemanfaatan media digital sebagai instrumen komunikasi politik modern. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, interpretasi, motivasi, dan pengalaman subjektif para legislator serta publik dalam proses representasi digital yang tidak dapat ditangkap melalui instrumen kuantitatif yang bersifat terukur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah menghadirkan perubahan mendasar dalam cara aktor politik menjalankan fungsi representasi. Representasi politik, yang dahulu sangat bergantung pada mekanisme tatap muka, forum formal, atau media massa konvensional, kini mengalami transformasi substansial melalui penggunaan media digital.(Prayoga et al., 2025) Dalam konteks ini, politisi tidak lagi hadir semata sebagai pembicara dalam forum legislatif atau kegiatan konstitusional, tetapi juga sebagai aktor digital yang menjalankan sebagian fungsi representasi melalui platform yang bersifat interaktif, cepat, dan dapat diakses oleh publik kapan saja. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada tataran nasional, tetapi juga meresap hingga ke level pemerintahan daerah, termasuk Kota Jambi. Legislator Kota Jambi menghadapi tekanan baru sekaligus kesempatan baru yang muncul dari tuntutan mediatization politik, di mana ruang digital menjadi arena penting untuk membangun legitimasi, memperluas basis partisipasi, dan memelihara hubungan dengan masyarakat. Transformasi ini menjadikan representasi digital bukan sekadar aktivitas pelengkap, melainkan sebuah domain baru dari politik perwakilan. Di dalam politik Indonesia kontemporer, media sosial telah menjadi medium politik yang strategis, baik untuk pemilihan umum, penyampaian kebijakan, maupun komunikasi politik sehari-hari.(Ilmu et al., 2024) Politisi yang sebelumnya mengandalkan jaringan sosial langsung, media massa lokal, atau kegiatan reses tradisional untuk menjangkau masyarakat kini melihat bahwa media sosial memberikan ruang ekspresi yang mampu mengatasi keterbatasan spasial dan temporal. Legislator tidak lagi harus menunggu jadwal reses untuk menampung aspirasi; mereka dapat menerima, merespons, atau bahkan mengelola persepsi publik secara real time melalui perangkat digital. Inilah perubahan mendasar yang kemudian memperkaya sekaligus menggeser pemahaman tradisional mengenai apa yang disebut sebagai representasi politik.(Mahardika, 2024)

Dalam konteks Kota Jambi, representasi digital menjadi fenomena yang semakin menonjol seiring dengan peningkatan penetrasi internet dan penggunaan media sosial oleh masyarakat. Kota Jambi, sebagai ibu kota provinsi dengan tingkat urbanisasi yang relatif tinggi, memiliki demografi pengguna media digital yang dinamis, terutama pada kelompok usia produktif. Keadaan ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi para legislator untuk memanfaatkan platform digital sebagai salah satu instrumen komunikasi politik mereka. Di sisi

lain, semakin kuatnya kultur digital dalam komunitas urban juga mendorong ekspektasi baru dari masyarakat terhadap legislator mereka. Publik tidak lagi cukup puas dengan komunikasi politik yang bersifat sporadis dan terbatas, melainkan menginginkan keterbukaan, akuntabilitas, dan pantauan aktivitas legislatif secara berkelanjutan.

Representasi digital legislator Kota Jambi muncul sebagai respons terhadap dinamika tersebut. Beberapa legislator mulai mengembangkan pola komunikasi yang lebih modern dan bersifat personal melalui akun media sosial pribadi maupun akun resmi fraksi. Mereka memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia, seperti unggahan foto kegiatan, video penjelasan kebijakan, siaran langsung rapat penting, hingga ruang komentar yang memungkinkan adanya percakapan langsung antara legislator dan konstituen. Aktivitas digital ini sebenarnya mencerminkan bentuk baru dari representasi yang secara konseptual dapat dikategorikan sebagai representasi interaktif. Representasi ini tidak berada dalam kerangka formal seperti rapat paripurna atau forum reses, melainkan berlangsung dalam ruang siber yang penuh fluiditas dan memungkinkan terjadinya interaksi spontan serta responsivitas yang tinggi.

Namun, representasi digital tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk komunikasi politik baru. Ia merupakan manifestasi dari perubahan struktur sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Teori mediatization politik menjelaskan bagaimana media termasuk media digital tidak hanya menjadi mediator, tetapi juga mempengaruhi bentuk, isi, dan praktik politik.(Bandaso et al., 2022) Dalam kasus Kota Jambi, penggunaan media sosial oleh legislator memunculkan bentuk representasi yang sangat dipengaruhi logika digital: visual, cepat, ringkas, dan sering kali berorientasi pada impresi publik. Legislator yang aktif di media sosial cenderung menonjolkan aktivitas mereka secara konsisten agar tetap terlihat hadir, responsif, dan relevan. Ini membawa implikasi penting terhadap kualitas representasi, sebab media digital mendorong politisi untuk mengemas kerja-kerja mereka dalam format visual yang mudah dicerna publik.

Pada tahap ini, perlu dipahami bahwa kualitas representasi digital tidak hanya diukur dari intensitas kehadiran legislator di media sosial, tetapi juga dari kemampuan mereka menyampaikan substansi kebijakan secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, banyak legislator di tingkat lokal yang masih memanfaatkan media sosial sebagai sarana pencitraan permukaan, seperti menghadiri acara, membagikan kegiatan seremonial, atau menampilkan interaksi simbolik seperti penyerahan bantuan. Representasi yang seperti ini memang dapat meningkatkan visibilitas personal, tetapi belum tentu meningkatkan kualitas hubungan substantif antara legislator dan konstituen.(Efendi, 2024) Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran dari representasi substantif kepada representasi simbolik, yang secara politis mungkin menguntungkan, tetapi secara demokratis belum tentu memperkuat kualitas partisipasi masyarakat.

Lebih jauh lagi, representasi digital di Kota Jambi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan DPRD itu sendiri. Struktur organisasi DPRD, kebijakan komunikasi internal, serta kapasitas anggota dalam mengelola konten digital menentukan sejauh mana representasi digital dapat dioptimalkan. Legislator yang memiliki staf ahli atau tim media biasanya lebih mampu mengembangkan strategi komunikasi digital yang konsisten dan sistematis. Mereka memiliki alur kerja yang jelas, mulai dari produksi konten, verifikasi informasi, hingga publikasi dan interaksi dengan masyarakat. Sebaliknya, legislator yang tidak memiliki dukungan struktural tersebut cenderung melakukan komunikasi digital secara sporadis, tidak terjadwal, atau hanya pada momen tertentu seperti menjelang pemilu.

Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan dalam kapasitas digital di kalangan legislator. Kesenjangan ini menghasilkan disparitas kualitas representasi digital: beberapa anggota DPRD tampil sebagai figur publik modern yang mampu memanfaatkan media sosial secara efektif, sementara yang lain tampak kesulitan mengadopsi teknologi sebagai bagian dari

kerja politik mereka. Disparitas tersebut berdampak pada persepsi publik mengenai siapa legislator yang dianggap aktif dan peduli terhadap masyarakat. Publik Kota Jambi yang semakin melek teknologi cenderung memberikan perhatian lebih kepada legislator yang menunjukkan keterlibatan digital yang intens, meskipun hal itu belum tentu mencerminkan kualitas kerja legislasi dan pengawasan secara objektif. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi politik, tetapi juga arena persaingan simbolik. Legislator secara tidak langsung saling berkompetisi untuk mendapatkan perhatian publik, meningkatkan jumlah pengikut, dan meraih tingkat interaksi yang tinggi. Fenomena ini menciptakan bentuk pasar politik baru dalam ruang digital, di mana popularitas diukur melalui metrik-metrik digital seperti jumlah like, komentar, dan bagikan. Walaupun metrik tersebut tidak mencerminkan kualitas representasi secara substantif, persepsi publik yang terbangun melalui logika digital sering kali memberi pengaruh lebih besar daripada pencapaian legislasi yang tidak divisualisasikan.(Angretnowati, 2021)

Konteks sosial masyarakat Kota Jambi juga mempengaruhi bagaimana representasi digital terbentuk. Budaya politik lokal yang menggabungkan tradisi musyawarah dengan modernitas digital menghadirkan pola interaksi yang unik. Masyarakat tetap menghargai tatap muka dan hubungan personal dalam politik, tetapi di sisi lain sangat aktif mengonsumsi informasi melalui media sosial. Inilah yang menyebabkan legislator harus memadukan dua pendekatan: menjaga hubungan sosial tradisional sekaligus membangun kehadiran digital yang kredibel. Representasi digital menjadi pelengkap yang memperluas jangkauan representasi tatap muka, bukan menggantikannya sepenuhnya.

Di sisi lain, tumbuhnya ruang digital juga memunculkan bentuk partisipasi masyarakat yang lebih berani dan kritis. Warga Kota Jambi kini lebih aktif mengajukan kritik, mengajukan usulan, atau bahkan menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik melalui ruang komentar atau pesan langsung di media sosial legislator. Ruang digital memungkinkan masyarakat mengekspresikan pendapat mereka tanpa harus hadir dalam forum resmi yang sering kali dianggap kaku dan terbatas. Dengan demikian, representasi digital menciptakan ruang demokrasi baru yang lebih terbuka, meskipun tetap rentan terhadap konflik opini, misinformasi, dan polarisasi.(Syafhendry, 2024)

Pada tahap awal pembahasan ini, jelas bahwa representasi digital legislator di Kota Jambi merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Ia bukan hanya soal penggunaan teknologi atau intensitas unggahan di media sosial, tetapi juga mencerminkan dinamika hubungan antara aktor politik, institusi parlemen, perkembangan teknologi, dan budaya politik lokal. Representasi digital membawa harapan akan terciptanya komunikasi politik yang lebih egaliter dan transparan, namun pada saat yang sama membuka ruang bagi tantangan baru yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi lokal. Dengan memahami hal ini secara mendalam, pembahasan pada bagian-bagian berikutnya akan menguraikan lebih jauh bagaimana representasi digital dijalankan, apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi, serta bagaimana implikasinya terhadap kualitas demokrasi di Kota Jambi.(Pratiwi et al., 2024)

Perkembangan representasi digital yang dibangun oleh legislator Kota Jambi tidak hanya memuat dimensi simbolik dan penyebaran informasi, tetapi juga menunjukkan dinamika interaksi yang lebih kompleks antara wakil rakyat dan konstituennya. Di dalam ruang digital, relasi politik mengalami transformasi yang signifikan: tidak lagi berbasis pada hierarki formal antara pejabat publik dan masyarakat, melainkan pada pola komunikasi yang lebih cair, simultan, dan interaktif. Ruang digital memungkinkan terjadinya pertukaran pesan secara dua arah yang sebelumnya sulit dipraktikkan melalui mekanisme pertemuan formal seperti reses atau rapat dengar pendapat. Dalam konteks ini, representasi digital menjadi media yang menjembatani kesenjangan komunikasi yang selama ini menjadi persoalan klasik di dalam sistem politik lokal. Salah satu fenomena penting yang muncul dari penggunaan media digital

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

oleh legislator Kota Jambi adalah tumbuhnya bentuk komunikasi yang bersifat dialogical, di mana legislator tidak hanya berbicara kepada publik, melainkan juga menerima dan menanggapi umpan balik secara langsung. Interaksi semacam ini dapat diamati ketika legislator memposting konten mengenai kegiatan kedewanan atau isu kebijakan tertentu, lalu memicu respons publik dalam bentuk komentar, kritik, atau pertanyaan. Legislator yang responsif akan membalas komentar tersebut, memberikan penjelasan tambahan, atau setidaknya menunjukkan bahwa mereka membaca dan memahami aspirasi masyarakat. Proses ini membangun persepsi bahwa legislator benar-benar hadir dan memperhatikan kebutuhan warganya. Meskipun interaksi digital tidak mampu menggantikan kualitas diskusi mendalam yang biasanya hadir dalam pertemuan tatap muka, pola komunikasi ini tetap memiliki nilai politik yang besar karena menciptakan kedekatan psikologis yang sulit dicapai oleh komunikasi konvensional.(Bandaso et al., 2022)

Kehadiran legislator dalam ruang digital juga membuka ruang bagi publik untuk melakukan bentuk pengawasan informal terhadap kinerja mereka. Publik kini dapat secara langsung memberikan kritik terhadap kebijakan tertentu, menanyakan alasan legislator mendukung atau menolak agenda kebijakan, atau bahkan mempertanyakan absensi mereka dalam rapat-rapat penting. Bentuk pengawasan partisipatif ini tidak memerlukan struktur organisasi masyarakat sipil yang kuat, tetapi cukup melalui komentar atau diskusi publik di media sosial. Legislator yang tidak aktif atau tidak responsif akan dengan mudah mendapatkan sorotan negatif dari masyarakat, sementara mereka yang menunjukkan konsistensi dalam memberikan informasi substantif akan memperoleh kepercayaan publik yang lebih besar. Dengan demikian, ruang digital menciptakan mekanisme accountability baru yang lebih fleksibel, cepat, dan tidak terikat pada prosedur formal. Ruang digital memberikan kesempatan bagi legislator untuk mengembangkan praktik representasi substantif, yakni menjelaskan isu kebijakan, menjelaskan posisi mereka, dan memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua legislator memanfaatkan peluang ini dengan optimal. Beberapa legislator cenderung mengunggah konten yang bersifat seremonial atau personal branding tanpa memberikan konteks kebijakan yang memadai. Ketika legislator hanya menampilkan kegiatan seremonial seperti kunjungan, pembagian bantuan, atau foto bersama tokoh masyarakat, mereka sebenarnya memperkuat model representasi simbolik yang tidak sepenuhnya mencerminkan kerja legislatif substantif. Meski konten seperti itu dapat meningkatkan popularitas, namun tidak banyak berkontribusi pada literasi politik masyarakat. Meski demikian, sejumlah legislator Kota Jambi mulai memperlihatkan upaya untuk menghadirkan konten yang lebih informatif. Beberapa di antaranya memanfaatkan video pendek untuk menjelaskan isu kebijakan lokal, seperti peraturan tentang retribusi, pengelolaan sampah, tata kelola transportasi, atau persoalan anggaran. Mereka mencoba mengemas isu yang kompleks menjadi narasi yang mudah dipahami publik. Upaya ini menunjukkan bahwa representasi digital dapat berfungsi sebagai ruang edukasi politik, asalkan legislator memiliki kapasitas komunikasi yang memadai. Dalam beberapa kasus, legislator bahkan menunjukkan perkembangan kemampuan retorika digital, di mana mereka dapat menyesuaikan gaya bahasa, visualisasi, dan ritme komunikasi sesuai dengan karakteristik pengguna media sosial di Kota Jambi, terutama kalangan muda. (Hendrik, 2025)

Transformasi yang terjadi melalui representasi digital juga memberikan peluang bagi legislator untuk mengatasi hambatan-hambatan yang biasanya muncul dalam komunikasi politik tradisional. Salah satu hambatan utama dalam politik lokal adalah aksesibilitas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran atau yang jarang berinteraksi langsung dengan pejabat publik. Media sosial menghapus hambatan ini dengan menyediakan ruang di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau lokasi geografis, dapat berkomunikasi dengan legislator. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi terkait persoalan

listrik, air bersih, jalan rusak, sekolah, atau keluhan administrasi secara langsung melalui pesan pribadi atau komentar. Legislator dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan lebih cepat dan efisien, bahkan terkadang lebih cepat daripada mekanisme birokratis formal. Namun, peluang yang dihasilkan oleh representasi digital juga menghadirkan sejumlah tantangan struktural dan kultural. Tantangan struktural berkaitan dengan bagaimana legislator dan DPRD Kota Jambi menata perangkat kelembagaan untuk mendukung komunikasi digital yang efektif. Tidak semua legislator memiliki staf khusus yang dapat mengelola media sosial secara profesional, memverifikasi informasi, dan merespons publik dengan tepat. Beberapa legislator menjalankan fungsi komunikasi digital secara mandiri, yang terkadang menghasilkan beban kerja tambahan. Ketidaksiapan kelembagaan ini berpotensi menurunkan kualitas representasi digital, terutama ketika legislator tidak mampu mempertahankan konsistensi unggahan atau respons terhadap publik.

Sementara itu, tantangan kultural berkaitan dengan bagaimana budaya politik lokal berinteraksi dengan ruang digital. Sebagian masyarakat Kota Jambi masih memegang teguh nilai-nilai tatap muka sebagai cara utama berkomunikasi dengan pejabat publik. Media sosial dianggap sebagai pelengkap, bukan substitusi. Akibatnya, meskipun representasi digital semakin berkembang, ia tetap harus dipadukan dengan aktivitas politik tradisional seperti musyawarah desa, pertemuan RT, atau kunjungan lapangan. Legislator yang terlalu mengandalkan media sosial tanpa membangun hubungan personal dalam komunitas lokal berpotensi kehilangan dukungan dari kelompok masyarakat yang tidak familiar dengan teknologi digital. Oleh karena itu, pada tingkat implementasi, representasi digital tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus menjadi bagian dari strategi komunikasi yang lebih luas dan kontekstual. Penggunaan media sosial sebagai ruang representasi juga dipengaruhi oleh dinamika politik elektoral. Legislator yang sedang mempersiapkan diri untuk pemilihan kembali cenderung lebih intens dan kreatif dalam penggunaan media sosial. Mereka menggunakan platform digital sebagai panggung kampanye yang berkelanjutan, meskipun konten yang disampaikan dikemas sebagai aktivitas legislatif. Situasi ini membuat representasi digital berpotensi tercampur antara kepentingan publik dan kepentingan elektoral pribadi. Dalam kondisi seperti ini, konten-konten politik yang beredar di ruang digital Kota Jambi dapat mengalami bias pencitraan, di mana substansi kebijakan sering kali dikaburkan oleh kebutuhan politisi untuk mempertahankan popularitas. Ruang digital pada akhirnya menjadi arena di mana berbagai strategi politik ini saling bersinggungan. Di satu sisi, representasi digital menawarkan peluang bagi demokratisasi informasi, pembentukan relasi politik yang lebih horizontal, dan peningkatan transparansi. Di sisi lain, ia juga membuka ruang bagi politik pencitraan, konflik naratif, dan penyederhanaan masalah kompleks menjadi pesan visual yang mudah dikonsumsi namun dangkal. Ruang digital memberi kesempatan bagi legislator untuk memperlihatkan diri sebagai aktor publik yang aktif dan responsif, tetapi juga berpotensi menciptakan kesenjangan antara citra yang ditampilkan dengan realitas kinerja legislatif substantif.

Dalam kajian representasi modern, salah satu tantangan terbesar dari politik digital adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara komunikasi yang efektif dan substansi kebijakan yang akurat. Representasi digital cenderung mendorong politisi untuk mengutamakan bentuk (form) daripada isi (content), karena logika platform media sosial mengutamakan kecepatan, visualisasi, dan daya tarik emosional. Legislator yang ingin mendapatkan perhatian publik harus mampu menyesuaikan diri dengan logika tersebut. Namun, keterlibatan yang berlebihan dalam pencitraan digital dapat mengurangi upaya legislator untuk menyampaikan informasi kebijakan secara mendalam. Tantangan ini terlihat jelas dalam konteks Kota Jambi, di mana mayoritas unggahan legislator masih bersifat visual dengan penjelasan minimal, meskipun terdapat beberapa contoh yang menunjukkan usaha untuk menggabungkan estetika digital dengan substansi kebijakan. Secara keseluruhan, representasi digital di Kota Jambi

memperlihatkan dinamika yang kaya dan multilapis. Relasi politik yang terbentuk di ruang digital tidak lagi kaku atau hierarkis, tetapi lebih bersifat fluid dan bersifat timbal balik. Publik memiliki ruang untuk berpartisipasi, mengawasi, dan mengekspresikan opini mereka, sementara legislator memiliki ruang untuk memperluas jangkauan representasi mereka. Transformasi ini menunjukkan bahwa representasi politik di era digital tidak lagi terbatas pada proses formal yang berlangsung dalam ruangan legislatif, tetapi juga mencakup proses interaksi simbolik dan substantif yang terjadi secara konstan di ruang digital. Dengan demikian, representasi digital bukan hanya fenomena teknologis, tetapi juga fenomena politik yang membawa implikasi luas terhadap kualitas demokrasi lokal.(Jovani, 2021)

KESIMPULAN

Representasi digital legislator di Kota Jambi menunjukkan bahwa transformasi komunikasi politik modern telah menciptakan lanskap baru hubungan antara wakil rakyat dan publik. Digitalisasi menghadirkan peluang strategis bagi para legislator untuk memperkuat legitimasi politik, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan membangun pola komunikasi dua arah yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Namun, bersamaan dengan peluang tersebut muncul pula tantangan struktural, kultural, dan teknologis yang perlu ditangani secara sistematis agar representasi digital mampu berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Secara umum, peluang utama yang dihasilkan oleh digitalisasi bagi legislator Kota Jambi terletak pada kemampuan teknologi untuk memperluas jangkauan komunikasi politik. Media sosial, platform berita daring, dan kanal digital lainnya memungkinkan legislator menampilkan kinerja secara lebih transparan, menyebarkan informasi legislasi dengan cepat, dan membangun citra politik yang lebih personal. Dalam konteks daerah dengan dinamika sosial yang heterogen, representasi digital berpotensi memperkuat keterhubungan antara legislator dan konstituen yang sebelumnya terbatasi oleh ruang, waktu, atau minimnya akses dalam komunikasi tatap muka. Hal ini sejalan dengan teori demokrasi deliberatif yang menekankan peran teknologi dalam memperluas ruang publik diskursif, sehingga masyarakat dapat terlibat dalam percakapan politik dengan intensitas yang lebih tinggi.

Namun demikian, representasi digital legislator juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Tantangan pertama adalah disparitas literasi digital di kalangan masyarakat Kota Jambi, yang menyebabkan pesan politik tidak selalu diterima secara merata atau tidak dipahami sebagaimana mestinya. Kedua, konsistensi penggunaan platform digital oleh legislator masih bersifat tidak merata; sebagian legislator aktif dan adaptif, sementara sebagian lain menggunakan kanal digital hanya sebagai sarana publikasi seremonial. Ketiga, komunikasi digital sangat rentan terhadap bias informasi, penyebaran hoaks, dan polarisasi opini, sehingga menuntut legislator untuk memiliki kecakapan komunikasi digital yang lebih strategis dan etis. Tantangan keempat adalah tekanan untuk selalu hadir di ruang digital secara intens, yang dapat menimbulkan beban performatif sekaligus risiko pencitraan berlebihan yang tidak selalu mencerminkan kinerja substantif. Dari perspektif kelembagaan, representasi digital memunculkan tuntutan baru bagi lembaga legislatif agar mampu menyesuaikan diri dengan era komunikasi politik modern. Digitalisasi bukan hanya sekadar menghadirkan kanal baru penyebaran informasi, tetapi juga menuntut adanya perubahan kultur organisasi, peningkatan kapasitas komunikasi staf, penguatan tata kelola informasi, serta regulasi yang melindungi integritas data publik. Tanpa penguatan institusional ini, representasi digital berisiko menjadi aktivitas individual semata tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi lokal.

Kesimpulannya, representasi digital legislator di Kota Jambi berada pada persimpangan antara peluang strategis dan tantangan operasional. Jika dikelola dengan baik, digitalisasi dapat menjadi instrumen penguatan akuntabilitas publik, peningkatan partisipasi masyarakat, dan

perbaikan kualitas komunikasi politik. Namun, jika tantangan-tantangan struktural dan kultural tidak diatasi, representasi digital berpotensi hanya menjadi ruang pencitraan yang tidak membawa perubahan substantif pada kualitas relasi legislator–konstituen. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, memperkuat kapasitas komunikasi legislator, dan membangun ekosistem teknologi politik yang inklusif, aman, dan responsif. Dengan demikian, representasi digital dapat berfungsi sebagai instrumen demokrasi yang sehat sekaligus pilar penting dalam komunikasi politik modern di Kota Jambi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para legislator dan staf Sekretariat DPRD Kota Jambi yang telah memberikan data, informasi, serta waktu yang berharga dalam proses penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada para dosen, akademisi, dan rekan-rekan peneliti yang telah memberikan masukan konstruktif dan bimbingan ilmiah sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh informan dan pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi serta memberikan perspektif penting mengenai dinamika representasi digital di Kota Jambi. Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada keluarga dan sahabat atas dukungan moral dan motivasi yang diberikan. Semoga segala bantuan dan dukungan tersebut menjadi kontribusi berarti bagi pengembangan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alfan Jamil, Fatkurohman Nur Rangga, Rama Dwi Rendra, & Thifli Ahmad. (2025). Media Sosial Sebagai Sarana Pembentukan Identitas Politik Pemuda. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, *2*(3), 244–253. https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.2023

Almadhea, Y. Z., Salahudin, S., & Firdaus, M. (2024). Political Participation Active in Digital Era Studies: A Systematic Literature Review (SLR). *Jurnal Politikom Indonesiana*, *9*(1), 40–63. https://doi.org/10.35706/jpi.v9i1.11299

Angretnowati, Y. (2021). *Sekali Lagi Tentang "Menyelamatkan Ruang Publik"* (Vol. 32, Issue 3).

Bandaso, M. P., Ela, K., Janto, Palittin, M., & Karru, J. A. (2022). Kondisi Mediatisasi Kontemporer Agama Pada Status Kritis Dan Arah Masa Depan. *Tepian : Jurnal Misiologi Dan Komunikasi Kristen*, *2*(2), 1–15. https://doi.org/10.51667/tjmkk.v2i2.1238

Efendi, A. (2024). *POTRET REPRESENTASI ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DPRD KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2019-2024*. *February*, 4–6.

Hendrik, D. (2025). *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung MEMILIH MASYARAKAT DI KECAMATAN PADANG SELATAN PADA PILKADA 2024 Jurnal JISIPOL*. *9*, 49–57.

Ilmu, M., Universitas, P., Ilmu, D., & Universitas, P. (2024). *Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro 1*. 1–22.

Jovani, A. (2021). *Representasi Substantif Perempuan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2014-2019*.

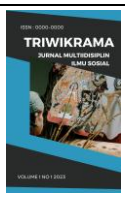
Mahardika, D. D. K. (2024). *Kebijakan Publik*. *February*, 4–6.

Nidya Agustin Beni Prasetyo, Z. I. R. (2022). *New Media dan Komunikasi Dakwah*.

Pratiwi, C. S., Dimasrizal, D., Rohayati, W., Dori Efendi, & Khairunnisa, K. (2024). Perempuan dan partai politik: Problematika rekrutmen kader perempuan pada Partai Amanat Nasional di Provinsi Jambi. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, *4*(6), 1208–1216. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i6.1081

Prayoga, B., Wiryany, D., & Meltareza, R. (2025). Representasi Komunikasi Politik pada Video Epic Rap Battle Of Presidency 2024 : Analisis Semiotika John Fiske. *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *6*(01), 66. http://ejournal.amikompurwokerto.ac.id/index.php/AGUNA

Syafhendry. (2024). Pengantar Ilmu Politik. In *Educacao e Sociedade* (Vol. 1, Issue 1).



http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/